



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI JAWA TENGAH
4-8 NOVEMBER 2020**

*

**

**

*

JAKARTA 2020



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI JAWA TENGAH
4-8 NOVEMBER 2020

I. PENDAHULUAN

1. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada hari Senin, 24 Agustus 2020.
4. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI tanggal 23 September 2020 perihal Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait:
 - a. infrastruktur sarana dan prasarana serta sebaran dan rentang kendali kinerja Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Pekalongan;
 - b. ketersediaan stok pupuk serta kapasitas gudang dan infrastruktur Gudang Pupuk PUSRI Pekalongan serta realisasi pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Pekalongan;
 - c. ketersediaan stok beras dan non-beras serta kapasitas gudang dan infrastruktur Gudang BULOG Baru Bondansari, serta realisasi pengadaan beras Kabupaten Pekalongan;
 - d. Pelaksanaan program penanaman padi kaya gizi (biofortifikasi) dalam rangka mengatasi *stunting* di Kabupaten Pemalang; dan
 - e. pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa getah pinus oleh *Perhutani Pine Chemical Industry* (PPCI) di Kabupaten Pekalongan.
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Jawa Tengah; serta

3. menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

4. **SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si., dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

E. **PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 4-8 November 2020 dan bertempat di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang.

F. **GAMBARAN UMUM**

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.800,69 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2020 berjumlah 34.718.204 jiwa dengan kepadatan 1.058,46 jiwa/km².

Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan grumusol; sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur.

Jawa Tengah memiliki iklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21-32oC. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusakambangan bagian barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di

musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sensus 2015 adalah 35.557.249 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik.

Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN KE SATUAN PENGAWAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKALONGAN

Indonesia dikenal dengan potensi sumber daya ikan yang begitu melimpah dimana memiliki *biodiversity* yang sangat beragam. Dengan potensi sumber daya ikan yang besar, sudah selayaknya rakyat Indonesia sejahtera melalui sektor kelautan dan perikanan, terlebih lagi bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang jumlah penduduknya sangat besar, maka dituntut negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, keterpurukan, dan keterbelakangan ekonomi.

Menurut Badan Pangan PBB, pada tahun 2021 konsumsi ikan penduduk dunia diperkirakan mencapai 19,6 kg per tahun. Artinya daya serap masyarakat terhadap konsumsi ikan cukup bagus. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Satwas PSDKP pekalongan untuk produktif menjaga dan melindungi serta

melibatkan unsur masyarakat (Pokmaswas) dalam menjamin daya dukung sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di wilayah kerja Pantai Utara Jateng (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang) agar tetap lestari, berkelanjutan, dan optimal pemanfaatnya.

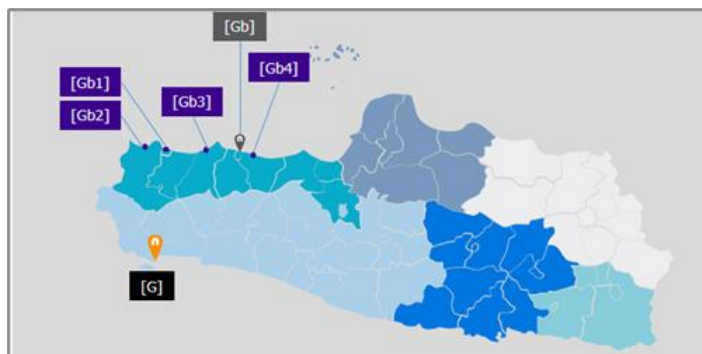
Komisi IV DPR RI melihat ketersediaan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan, masih melimpah meski di perairan laut terjadi kondisi cuaca buruk. Bahkan produksi ikan setiap harinya mampu mencapai 90 ton atau Rp1,2 miliar dengan komoditas utamanya adalah ikan tongkol, lemuru, dan layang, sehingga sumber daya kelautan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan ketahanan pangan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan karena memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, karena potensi laut Indonesia yang begitu melimpah ketersediaannya, menjadikan ruang tangkapan nelayan bisa memicu konflik antara nelayan satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu, Komisi IV DPR RI berharap peran Satwas PSDKP dapat menjadi pengayom dan pelindung berbagai kepentingan nelayan agar tercipta suasana yang kondusif.

Adapun potensi produksi perikanan di laut Jawa pada umumnya mengalami penurunan akibat adanya *overfishing* atau overeksploitasi sehingga implikasinya berdampak buruk bagi keberlangsungan sumber daya ikan dan berdampak buruk dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat yang bergizi. Terlebih lagi di daerah perbatasan adanya modus operasi *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU Fishing)* yang masih ada/marak. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI meminta kepada Satwas PSDKP Pekalongan agar senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk menindak tegas bentuk pelanggaran kapal yang melakukan *IUU Fishing*, misalnya ada pemalsuan Dokumen, *Mark Down*, Mematikan VMS & AIS, *Double flagging & Registered*, Tidak Izin SLO & SPB, Merubah Call Sign & Mesin, *Transshipment Illegal*, serta berbagai jenis tindak pidana lain seperti perdagangan orang, perbudakan, pencucian uang, transaksi BBM secara ilegal, dan penyelundupan barang dan orang.

1. Profil Singkat

- a. Kantor Satwas SDKP Pekalongan beralamat di Jl. Sekuning No. 2, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

- b. Sebaran dan Rentang Kendali Satuan Pengawasan Pekalongan di bawah Stasiun PSDKP Cilacap, dimana rentang kendali operasinya di Wilker Tegalsari, Wilker Brebes, Wilker Tanjungsari (Pemalang), Wilker Pekalongan, Wilker Batang.



- c. Armada Pengawasan SDKP yaitu Kapal Dolphin 029 dengan Kelas F, panjang 8 meter.



- d. SDM dan Aparatur terdiri dari 5 orang PNS JFT Pengawas Perikanan, 9 orang PNS JFU dan 10 orang Tenaga Kontrak dengan kewenangan Polsus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebanyak 2 orang.
- e. Penerbitan Hasil Pemeriksaan kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) di Satwas Pekalongan:

No	Satwas/ Wilker	Ijin Pusat			Ijin Daerah			Jumlah			% Laik	Σ Kapal Laik	Σ Kapal Tidak Laik
		HPK		SLO	HPK		SLO	HPK		SLO			
		D	B		D	B		D	B				
1.	Satwas Pekalongan	233	389	305	339	591	467	572	980	772	79%	772	208
2.	Wilker PSDKP Brebes	-	-	-	900	900	716	900	900	716	80%	716	184
3.	Wilker PSDKP Tegalsari	169	720	447	433	1040	800	602	1760	1247	71%	1247	513
4.	Wilker PSDKP Tanjung sari (Pemalang)	-	-	-	-	295	28	-	295	28	9%	28	267
5.	Wilker PSDKP Batang	219	289	66	1645	2049	1807	1864	2338	1873	80%	1873	465

Data Satwas Pekalongan tahun 2019

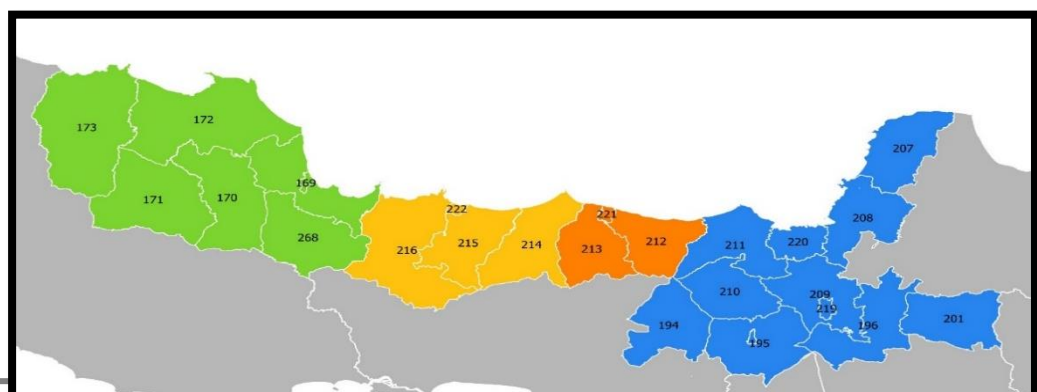
- f. Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), dimana sebagai salah satu syarat ekspor produk perikanan, yang menyatakan

bahwa ikan ditangkap tidak dengan cara-cara IUU fishing. Selama ini jumlah kapal yang telah diverifikasi sebanyak 68 unit (>30 GT) dengan wilayah tangkapannya di Perairan Laut Utara Jawa (WPPNRI 712), Selat Makasar (WPPNRI 713), Laut Aru (WPPNRI 718). Komoditasnya Ikan Layang, Lemuru, Banyar, Selar, dan Tongkol, yang akan di ekspor ke Uni Eropa.

- g. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) Sebagian besar pemanfaatannya merupakan pengajuan perpanjangan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter) untuk kapal > 30 GT, dimana selama tahun 2019 Satwas Pekalongan telah melayani 95 permohonan perpanjangan SKAT.
- h. Hasil pengawasan di lapangan terhadap kapal yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan:
 - 1) Alat tangkap “Arad/Mini Trawl” ditemukan di Kabupaten & Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten & Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang.
 - 2) Alat tangkap “Waring/Bolga” ditemukan di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Kendal.
 - 3) Alat tangkap “Setrum” ditemukan di Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Semarang.



- i. KKP mengusulkan adanya penataan organisasi di UPT PSDKP Jawa tengah kepada Gubernur dan Menteri PAN dan RB:



Rentang Kendali	Cakupan Area
Pangkalan PSDKP Pekalongan	Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan.
Satuan Pengawasan Cirebon	Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kota Cirebon.
Satuan Pengawasan Tegal	Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal.
Satuan Pengawasan Semarang	Kabupaten WOnosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang ⁽²²⁰⁾

2. Aspirasi/Masukan:

- a. Perlunya penguatan infrastruktur sarana dan prasarana pengawasan di satwas PSDKP Pekalongan, antara lain:
 - 1) Armada *speedboat* pengawasan.
 - 2) Dukungan lahan atau bangunan kantor dari Pemda.
 - 3) Kendaraan operasional pengawas.
 - 4) Akses jalan yang rusak ke pelabuhan.
- b. Perlu adanya peningkatan kepatuhan bagi kapal perikanan berukuran <10 GT yang belum terdaftar.
- c. Perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan sistem kelembagaan yang sinergi dan handal.
- d. Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- e. Perlu adanya perampingan dokumen berlayar kapal ukuran di atas 30 GT yang saat ini mencapai sekitar 30 dokumen, dan pengurusannya masih diurus di instansi yang berbeda dengan masa berlaku yang bervariasi.

- f. Subsidi solar yang masih belum merata di lapangan, mengingat banyaknya nelayan yang ada di pekalongan.

3. Tanggapan:

- a. Apresiasi atas perubahan paradigma pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang saat ini lebih didorong untuk menjadi sahabat nelayan dan membina nelayan Indonesia. Hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat positif.
- b. Perlu dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, apalagi ada fungsi pelayanan kepada nelayan juga yang dilaksanakan oleh aparat Pengawas Perikanan.
- c. Mendorong aparat Pengawas Perikanan yang ada di lapangan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya serta mendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.
- d. Harapannya Pemerintah Daerah dapat memperoleh tambahan anggaran APBN-P untuk peningkatan pembangunan fasilitas pelabuhan melalui program-program kerja kementerian terkait.
- e. Kesan kampung nelayan yang identik dengan kumuh, penduduknya miskin, pendidikan rendah dan rawan kriminalitas perlahan harus dibenahi bersama oleh semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- f. Rumitnya birokrasi sebetulnya sudah terjawab pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Hal ini dalam rangka menyederhanakan semua peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dari sisi kebijakan perizinan pengukuran kapal nelayan di atas 30 GT maka penyederhanaan di Undang-undang Omnibuslaw tersebut merupakan sebuah inovasi yang harus diapresiasi.
- g. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) agar segala permasalahan tentang nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam serta pengolah dan pemasar ikan segera terselesaikan melalui sistem satu pintu.
- h. Industri perikanan yang pernah mengalami kejayaan di nusantara pada masanya, maka sekarang ini akan terus kita perjuangkan untuk meraih

kembali kejayaan tersebut, dimana Pelabuhan *onshore* yang pernah dirintis pada tahun 2007, akan didorong kembali agar dapat segera terwujud.

- i. KKP juga menyampaikan bantuan modal usaha sebesar Rp2,143 miliar kepada 11 penerima bantuan. Penyerahan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen KKP dalam mendukung tumbuhnya iklim usaha perikanan di wilayah Pekalongan yang diharapkan akan berimplikasi positif bagi kesejahteraan nelayan.
- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang mengusulkan peningkatan kelembagaan pengawasan. Khususnya di wilayah pantai utara Jawa.

Rekomendasi:

- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti aspirasi nelayan dan stakeholder hasil kunjungan kerja reses ke Satwas PSDKP Kota Pekalongan, seperti:
 - a. Penguatan infrastruktur sarana dan prasarana pengawasan di Satwas PSDKP Pekalongan, antara lain: 1) Armada *speedboat* pengawasan, 2) Dukungan lahan atau bangunan kantor dari Pemda, 3) Kendaraan operasional pengawas, serta 3) tanggul dan akses jalan yang rusak.
 - b. Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) turunan dari Undang-undang Cipta Kerja agar segala permasalahan tentang nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar ikan segera terselesaikan melalui sistem satu pintu.
 - c. Perbanyak pelibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini telah dilakukan melalui sistem kelembagaan yang sinergi dan handal untuk peningkatan kepatuhan kapal perikanan berukuran < 10 GT yang belum terdaftar.
 - d. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai BBM, khususnya subsidi solar yang masih belum merata di nelayan.

- e. Memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana kampung nelayan di Kota Pekalongan agar kesan kumuh, penduduknya miskin, pendidikan rendah dan rawan kriminalitas perlahan berkurang dan hilang jika ada APBN-P tahun 2020.

B. KUNJUNGAN KE GUDANG PUPUK PUSRI (GPP) PEKALONGAN

Pertanian memiliki peran yang sangat vital dalam sistem ketahanan pangan, karena keberhasilan maupun kegagalan produksi hasil pertaniannya ditopang oleh kualitas pupuknya, artinya jaminan mutu dan efektivitasnya, harus sesuai dengan Badan Standarisasi Nasional yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian. Untuk itu, dalam uji mutu diperlukan analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, perlu menggunakan metode analisis yang ditetapkan. Sedangkan untuk uji efektivitas juga diperlukan manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisa ekonominya. Hal ini karena pupuk merupakan material esensial dalam mencukupi kebutuhan hara dan proses metabolisme berbagai tanaman.

Permasalahan yang sering terjadi di daerah-daerah adalah keterlambatan penyaluran bantuan pupuk sampai ke petani pada saat waktu musim tanam. Selanjutnya pada pascapanen sering terjadi harga jual yang kurang berpihak ke petani. Komisi IV DPR RI mengingatkan kepada Pemerintah untuk tahun 2020 ini jangan sampai terjadi keterlambatan distribusi pupuk, mengingat ada perluasan/ penambahan lahan baru areal tanam padi.

Adapun saat ini sudah ada 2,9 juta petani yang terdaftar, dimana 99,2% telah tercetak kartunya di wilayah Jawa Tengah. Namun perlu diantisipasi terhadap kartu tani yang telah digunakan/dimanfaatkan agar optimal penggunaannya. Untuk itu, Komisi IV DPR RI menghimbau agar PT Pupuk Indonesia senantiasa melakukan sosialisasi bertahap penggunaan kartu tani, mengingat ada penyesuaian dalam pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya dalam penggunaan teknologinya (petani masih ada yang lupa PIN, kendala gangguan sinyal, mesin belum stabil terkadang rusak, dan permasalahan lainnya).

1. Profil Singkat:

- a. PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki 100% oleh Pemerintah RI c.q. Kementerian BUMN.

b. Bidang usaha dan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) adalah:

1) Bidang Pupuk:

PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kaltim (PKT), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP).

2) Bidang Non-Pupuk:

PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Mega Eltra (ME), PT Pupuk Indonesia Energi (PIE), PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog), PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP).

c. Kapasitas Produksi

Kapasitas Produksi untuk Urea sebesar 9.362.500 Ton/tahun, NPK sebesar 3.380.000 Ton/tahun, SP-36 sebesar 500.000Ton/tahun, ZA sebesar dan ZK sebesar 20.000 Ton/tahun. Sedangkan untuk Pupuk sebesar 14.012.500 Ton/tahun, amoniak sebesar 7.094.500 Ton/tahun, produk lainnya sebesar 1.600.000 Ton/tahun.

d. Fasilitas Distribusi

- 1) Channel Distribusi dengan unit pengantongan sebanyak 4 unit dan Distribution Center sebanyak 6 DC.
- 2) Kapal sebanyak 12 unit.
- 3) Truck sebanyak 6.151 unit.
- 4) Gudang sebanyak 650 unit dengan kapasitas 2,93 jt ton.
- 5) Distributor sebanyak 1.185 unit dan kios sebanyak 28.834 unit.

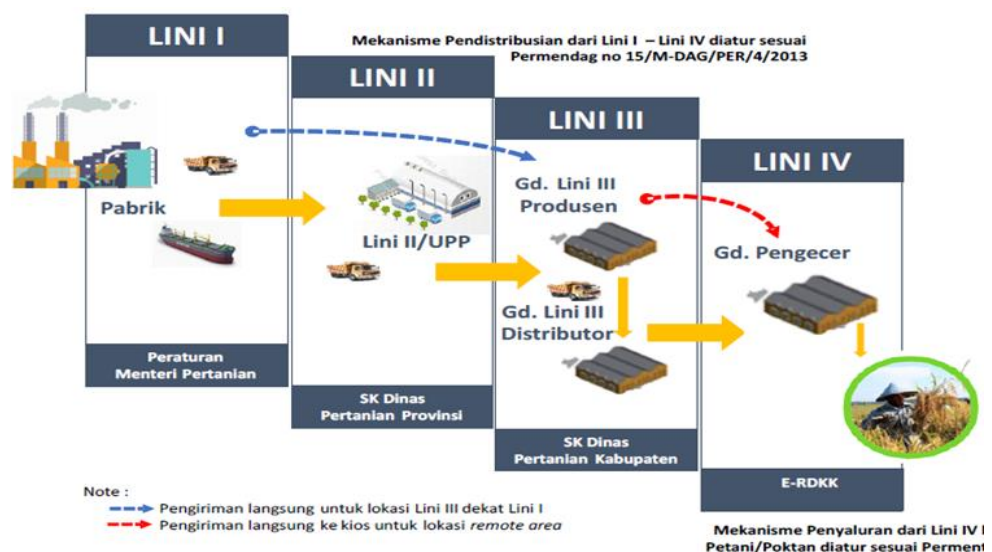
e. Produk Pupuk yang Dihasilkan:



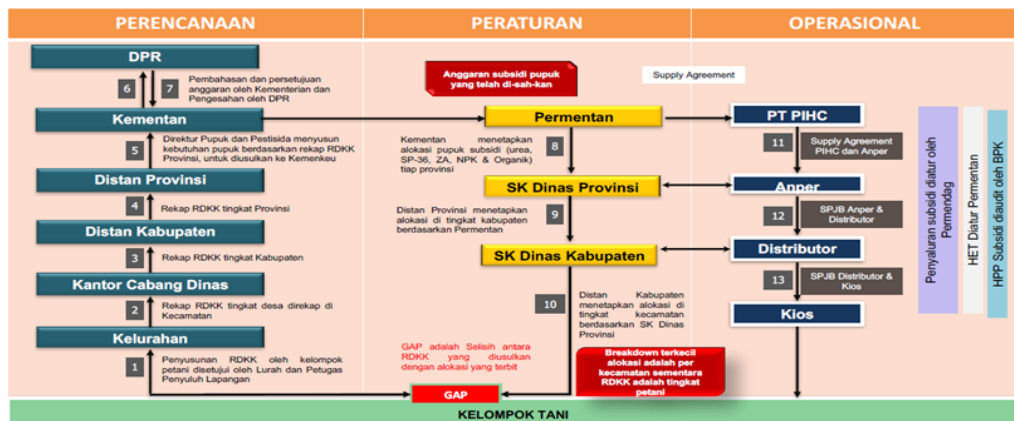
f. Jenis Pupuk Bersubsidi

- 1) Urea Rp1.800,00 per kg.

- 2) SP-36 Rp2.000,00 per kg.
 - 3) ZA Rp1.400,00 per kg.
 - 4) NPK Rp2.300,00 per kg.
 - 5) Organik Rp500,00 per kg.
- g. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana tercantum di dalam Permentan 47/2018 Pasal 11 ayat 1 – 3, bahwa pupuk bersubsidi berlaku untuk petani di Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi dengan Pembelian Tunai dan dalam kemasan utuh satuan Zak masing-masing jenis pupuk yaitu: Urea/SP-36/ZA/NPK dalam kemasan 50 kg dan Organik dalam kemasan 40 kg.
- h. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi seperti berikut:
- 1) PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatur pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (Enam) Tepat, yaitu Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.
 - 2) Produsen Wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (Enam) tepat dan memiliki/menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
 - 3) Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai ke Lini IV.
 - 4) Pengecer/Kios melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke Petani/Poktan.



i. Mekanisme, Perencanaan, Penetapan, dan Operasional Penyaluran Pupuk Subsidi



j. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional s.d. Oktober 2020

JENIS PUPUK	S.D 25 OKTOBER 2020			TAHUN 2020	
	REALISASI	ALOKASI	%	ALOKASI 2020	%
	1	2	3=1:2	4	5=1:4
UREA	3.169.483	3.421.823	93%	4.025.467	79%
SP-36	485.538	530.605	92%	600.000	81%
ZA	652.014	727.912	90%	850.000	77%
NPK	2.293.527	2.380.670	96%	2.688.000	85%
NPK KHUSUS	4.464	10.436	43%	17.000	26%
ORGANIK	471.826	571.697	83%	720.000	66%
TOTAL	7.076.851	7.643.143	93%	8.900.467	80%

Alokasi berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 27/2020

k. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Tengah s.d. Oktober 2020

JENIS PUPUK	S.D 28 OKTOBER 2020			TAHUN 2020	
	REALISASI	ALOKASI	%	ALOKASI 2020	%
	1	2	3=1:2	4	5=1:4
UREA	583.946	632.364	92%	741.553	79%
SP-36	78.087	91.235	86%	106.648	73%
ZA	123.546	141.711	87%	166.975	74%
NPK	360.793	380.354	95%	434.731	83%
ORGANIK	109.850	130.104	84%	160.600	68%
TOTAL	1.256.221	1.375.768	91%	1.610.507	78%

Alokasi berdasarkan SK. Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.34/012/IX/2020

l. Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kab. Pekalongan s.d. Oktober 2020

JENIS PUPUK	S.D 25 OKTOBER 2020		
	REALISASI	ALOKASI	%
	1	2	3=1:2
UREA	9.505	11.800	81%
SP-36	1.247	1.790	70%
ZA	723	1.000	72%
NPK	5.554	6.374	87%
ORGANIK	508	800	64%
TOTAL	17.537	21.764	81%

Alokasi berdasarkan SK. Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.34/012/IX/2020

m. Stok Pupuk Bersubsidi Nasional

JENIS PUPUK	Posisi Stok Tgl 02 Nop 2020		
	STOK LINI II - IV	KETENTUAN STOK PERMENDAG	%
	1	2	3=1:2
UREA	658.248	281.702	234%
SP-36	114.015	32.388	352%
ZA	102.934	56.976	181%
NPK	406.618	143.410	284%
ORGANIK	117.894	69.210	170%
TOTAL	1.399.709	583.686	240%

Stok pupuk bersubsidi per tgl. 2 November 2020 mencapai 240% apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang ditentukan.

n. Stok Lini III Pupuk Bersubsidi Kab Pekalongan

JENIS PUPUK	Posisi Stok Tgl 02 Nop 2020		
	STOK LINI III	KETENTUAN STOK PERMENDAG	%
	1	2	3=1:2
UREA	2.722	570	478%
SP-36	133	130	102%
ZA	40	40	100%
NPK	439	200	220%
ORGANIK	205	80	256%
TOTAL	3.539	1.020	347%

o. Data Kartu Tani Jateng

No.	DATA KARTU TANI JATENG
1.	JUMLAH PETANI TERDAFTAR : 2.953.843
2.	KARTU TANI TERCETAK : 2.930.776 (99,2 % dari jumlah petani)
3.	KARTU TANI TERDISTRIBUSI : 2.607.637
4.	KARTU TANI DALAM PROSES DISTRIBUSI : 323.139
5.	KARTU DIGUNAKAN : 627.490 (s.d September 2020)
6.	PRESENTASE KARTU DIGUNAKAN : 24,06 %
7.	EDC TERPASANG DI KPL : 4.892 Jumlah KPL 5.191 (94,2%)

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Prov Jawa Tengah (Oktober 2020)

p. Dukungan Pupuk Indonesia dalam Implementasi Kartu Tani, yakni:

- 1) Menerbitkan kebijakan kepada Produsen guna mendukung implementasi kartu tani di wilayah yang sudah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2) Turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Kartu Tani bersama dengan Kementan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, dan Himbara.

- 3) Menjadikan seluruh Kios menjadi Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan menyediakan data base KPL tersebut untuk keperluan sistem kartu tani Himbara.
- 4) Mempersiapkan proses dan ketentuan penagihan piutang dengan Dashboard Bank berbasis penyaluran menggunakan kartu tani

2. Aspirasi/Masukan:

- a. Belum semua Petani mendapatkan kartu tani di wilayah yang sudah ditetapkan wajib kartu tani Kendala Umum Dalam Implementasi Kartu Tani.
- b. Terdapat kendala teknis dalam penggunaan kartu tani (Petani lupa pin, kartu rusak, kartu belum terisi alokasi, EDC rusak, dan gangguan signal).
- c. Proses transaksi menggunakan kartu tani lebih lama dibandingkan penebusan secara manual (sebelum transaksi penebusan harus melakukan pengecekan saldo).
- d. Dibeberapa wilayah transaksi menggunakan kartu tani tidak tercatat dalam dashboard (Kab. Pati, Dairi, Jambi, dan Purworejo).
- e. Perlu ada harmonisasi kebijakan yang mewajibkan penggunaan Kartu Tani secara Nasional dalam Tata Niaga Pupuk.
- f. Perlu dukungan sarana dan prasarana dari Dinas terkait dengan validitas dan updating data e-RDKK, dan dukungan Himbara dalam proses pencetakan dan pendistribusian Kartu Tani, pemasangan mesin EDC, dan kesiapan Dashboard Bank.
- g. Perlunya exit strategi apabila terjadi kegagalan sistem (mekanisme penebusan manual yang dapat dipertanggung jawabkan) agar tidak terlambat.

3. Tanggapan:

- a. Petani di Jawa Tengah tidak perlu khawatir karena kami selalu memastikan tersedianya dan tercukupinya kebutuhan pupuk petani. Kemudian hadirnya kartu tani, kami harapkan dapat mempermudah petani dalam melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

- b. Penebusan pupuk bersubsidi, dengan kartu tani dapat menjadi identitas bagi petani, akurasi pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- c. Petani dapat manfaat lain, dimana kartu tani dapat sebagai kartu pinjaman bantuan dari tabungan dan kartu penjualan hasil panen.
- d. Selama periode musim tanam ini, petani tidak perlu khawatir tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena penyaluran pupuk dari lini I hingga lini IV diawasi oleh pihak dan aparat terkait.

Rekomendasi:

- ✓ Komisi IV DPR RI meminta *Holding Pupuk Indonesia* berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, seperti:
 - a. Penuntasan akses petani mendapatkan kartu tani di wilayah yang sudah ditetapkan mengingat implementasi masih banyak kendala.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana ke Dinas terkait melalui validitas dan updating data e-RDKK, dan dukungan Himbara dalam proses pencetakan dan pendistribusian Kartu Tani, pemasangan mesin EDC, dan kesiapan Dashboard Bank.
 - c. Selama periode musim tanam, petani mendapatkan jaminan pupuk bersubsidi khususnya sistem penyaluran pupuk dari lini I hingga lini IV yang melibatkan pihak dan aparat terkait.

C. KUNJUNGAN KE GUDANG BULOG BARU (GBB) BONDANSARI, PEKALONGAN

Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan pokok dasar yang menjadi prioritas setiap manusia, terlebih pada era pandemi Covid-19 ini kebutuhan manusia semakin meningkat dan beragam sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara, dimana ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi nasional, khususnya jika ketahanan pangan stok beras tidak tersedia di Bulog maka sewaktu-waktu dapat berpeluang timbulnya gejolak sosial dan politik di masyarakat akibat rapuhnya ketahanan pangan.

Tentunya dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi pengawasan ke Gudang Bulog Baru Pekalongan dalam rangka peninjauan ketersediaan stok cadangan beras dan non beras, serta mengecek standar kualitasnya agar stabilitas pangan nasional khususnya di wilayah kerja pekalongan tetap terjamin ketersediaannya, mengingat jumlah penduduk di Jawa Tengah tergolong padat dan tingkat konsumsinya tinggi dimana kurang lebih 34,74 juta jiwa masih bertumpu pada beras sebagai sumber kalori untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting mengingat cadangan beras pemerintah untuk masyarakat cabang Pekalongan yang membawahi wilayah kerja dari Brebes, Tegal, Pemalang, hingga Batang harus dipastikan benar-benar mencukupi, akurat, dan dapat tersalurkan dengan baik.

Tercatat luas lahan baku sawah nasional tahun 2018 adalah sebesar 7.105.145 hektar. Sedangkan untuk Jawa Tengah luas baku sawah tahun 2013 sebesar 1.103.774 hektar sehingga konsumsi beras selama tahun 2018 tercatat sebesar 3.718.112 kg, dan di tahun 2020 per 31 oktober 2020 ketersediaan stok beras di Pekalongan tercatat sebesar 12.889 ton dan gabah 4.182 ton, artinya ketersediaannya masih tergolong aman. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk menyerap beras bulog dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program Bantuan Sosial Beras (BSB).

1. Profil Singkat:

- a. Gudang Bulog Kab. Pekalongan membawahi wilayah 5 Kabupaten dan 2 Kota, yakni: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes.



b. Posisi Persediaan Beras Kantor Cabang Pekalongan

Satuan: Kg

NO	GUDANG	BERAS MEDIUM CBP (Kg)	BERAS PREMIUM (Kg)	BERAS KHUSUS (Kg)	BERAS HASIL REPROSES (Kg)	BERAS HAGIL KOM PREM (Kg)	BERAS AL HAMBRA (Kg)	GABAH DN (PSO) (Kg)
1	GBB MUNJUNG AGUNG	2,659,500	-	-	-	2,847.63	-	267,300
2	GBB PROCOT	1,344,450	-	-	-	-	-	-
3	GBB BONDANSARI	2,034,550	-	-	-	-	-	-
4	GBB KEDUNG KELOR	2,774,265	-	-	-	-	-	3,915,050
5	GBB CIMOHONG	2,092,895	-	-	9,443	-	-	-
6	GBB KANDEMAN	1,971,104	-	-	104	-	-	-
7	DC MUNJUNG AGUNG	-	5	11	-	-	141.70	-
8	DC BONDANSARI	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		12,876,764	5	11	9,547	2,847.63	141.70	4,182,350.00

*) per 31 Oktober 2020

c. Posisi Persediaan Non Beras Kantor Cabang Pekalongan

Satuan: Kg /Liter

NO	GUDANG	MINYAK GORENG KITA (1 Lt)	GULA (Kg)	TERIGU KITA (Kg)	DAGING SAPI KOM (Kg)
1	GBB MUNJUNG AGUNG	27,508	47,588	2,255	1,649
2	GBB PROCOT	-	-	-	-
3	GBB BONDANSARI	20,000	-	-	1,874
4	GBB KEDUNG KELOR	-	-	-	-
5	GBB CIMOHONG	-	-	-	-
6	GBB KANDEMAN	-	-	-	-
7	DC MUNJUNG AGUNG	936	1,293	220	351
8	DC BONDANSARI	-	12,980	-	-
TOTAL		48,444	61,861	2,475	3,874

*) per 31 Oktober 2020

d. Realisasi Pengadaan Kantor Cabang Pekalongan

NO	GUDANG	TARGET 2020	SD 30 JUNI 2020				TOTAL SETARA BERAS	%
			BERAS PSO	GABAH PSO	BERAS KOM	GABAH KOM		
1	GBB MUNJUNG AGUNG	9,453	2,659,500	267,300	3,523,228	10,278	6,362,742	67.31%
2	GBB PROCOT	6,932	1,344,450	-	14,160,567	-	15,505,017	223.67%
3	GBB BONDAN SARI	6,591	230,000	-	1,032,053	-	1,262,053	19.15%
4	GBB KEDUNGKELOR	8,375	1,480,600	3,915,050	1,484,085	-	5,450,742	65.08%
5	GBB CIMOHONG	6,790	177,300	-	713,700	-	891,000	13.12%
6	GBB KANDEMAN	7,680	157,150	-	6,724,918	-	6,882,068	89.61%
JUMLAH		45,821	6,049,000	4,182,350	27,638,551	10,278	36,353,621	79.34%

*) per 31 Oktober 2020

e. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2020 Kantor Cabang Pekalongan

NO	KANTOR CABANG	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 1 JAN - 31 OKT 2020				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			MELALUI RPK, AGEN/E-WARONG		MELALUI DISTRIBUTOR		KG	RP
			KG	RP	KG	RP		
1	PEKALONGAN	BERAS	18,349,030	186,114,865,700.00	698,000	6,805,500,000.00	19,047,030	192,920,365,700.00
		TELUR	231,693	5,410,730,500.00			231,693	5,410,730,500.00
		SAYUR	58,743	624,479,400.00			58,743	624,479,400.00
		DAGING AYAM	58,797	2,204,887,500.00			58,797	2,204,887,500.00
		IKAN	362,539	5,327,359,300.00			362,539	5,327,359,300.00

f. Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) tahun 2020 Kantor Cabang Pekalongan

NO	CABANG	KAB/KOTA	KEBUTUHAN			PERSENTASE (%) REALISASI PENYALURAN	GUDANG INDUK
			JUMLAH KPM	ALOKASI 1 BULAN (Kg)	ALOKASI 3 BULAN (Kg)		
1	PEKALONGAN	Kab. Batang	30,828	462,420	1,387,260	100%	GBB Kandeman
		Kab. Pekalongan	40,830	612,450	1,837,350	100%	GBB Bondansari
		Kota Pekalongan	11,089	166,335	499,005	100%	
		Kab. Pemalang	78,360	1,175,400	3,526,200	100%	GBB Kedungkelor
		Kab. Tegal	60,054	900,810	2,702,430	100%	GBB Munjung Agung
		Kota Tegal	7,402	111,030	333,090	100%	
		Kab. Brebes	117,618	1,764,270	5,292,810	100%	GBB Cimohong
TOTAL			346,181	5,192,715	15,578,145		

*) per 21 Oktober 2020

2. Aspirasi/Masukan:

- a. Mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk bansos tahap II mudah-mudahan bisa diberikan lagi secara baik untuk rakyat/petani, mengingat Bulog diberikan bantuan sosial dan stok cadangan beras oleh pemerintah.
- b. Petani Kabupaten Pekalongan masih kesulitan menjual beras kepada Bulog pada saat panen raya. Pasalnya, ada beberapa persyaratan kualitas beras yang tidak bisa dipenuhi, diantaranya kadar air yang terlalu tinggi.
- c. Lantai jemur beras di beberapa wilayah Kabupaten Pekalongan masih terbatas sehingga beras petani relatif masih basah.
- d. Petani berharap Bulog bisa membeli dengan harga yang tinggi dan bisa menerima kekurangan kualitas dari produksi beras petani pada saat panen raya, sehingga para petani mempunyai pendapatan lebih.
- e. Adanya Bumdes diharapkan bisa berperan dan Bulog bisa mendampingi serta membimbing.

3. Tanggapan:

- a. Tupoksi Komisi IV membuat ketentuan aturan perundang-undangan, melakukan hak budgeting kepada mitranya sekaligus pengawasan.
- b. Bulog merupakan bagian dari mitra kerja Komisi IV DPR RI yang mana gudangnya yang tersebar di seluruh Indonesia dipastikan tetap ada beras dan gabah.
- c. Komisi IV DPR RI menginginkan di desa, Bumdes dapat hidup, membangun gudang, sebagai mitranya Bulog, dimana setiap panen

raya, Bumdes melakukan operasi pembelian seluruh hasil panen rakyat. Untuk itu, langkah ini perlu disinkronisasi dengan kementerian terkait karena butuh waktu dan prioritas.

- d. Komisi IV berpesan untuk meningkatkan semangat enterpreneur (wirausaha), sehingga Bulog betul-betul menjadi pembantu Pemerintah agar rakyat khususnya petani dapat tersenyum.
- e. Untuk penyerapan secara nasional, Bulog sudah menyerap 1,1 juta setara beras dimana kedepan akan membangun sekitar 12 modern *rice mill* di seluruh Indonesia, adapun di Kabupaten Pekalongan penyerapan sekitar 36 ribu ton.
- f. Pangan di Kabupaten Pekalongan tak perlu dikhawatirkan, sebab produksi beras per tahun surplus sekitar 57.437 ton, dimana menurut RTRW Kab. Pekalongan memiliki lahan pertanian seluas 23.853 ha dengan kebutuhan beras sebesar 69.720 ton per 31 Oktober 2020 dapat terpenuhi.
- g. Bulog terus melakukan penyerapan dari petani, bahkan Bulog butuh penyaluran agar beras tidak menumpuk di gudang dengan terus berkomunikasi dengan semua pihak agar masalah-masalah yang ada segera teratasi.

Rekomendasi:

- ✓ Komisi IV DPR RI meminta Bulog untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada petani khususnya kepada BUMDES agar persyaratan kualitas beras yang diinginkan dapat dipenuhi dengan kadar air yang rendah.

D. KUNJUNGAN KE LOKASI PENANAMAN PADI KAYA GIZI (BIOFORTIFIKASI) DI DESA LENGGERONG. KECAMATAN BANTARBOLANG, KABUPATEN PEMALANG

1. Program Penanaman Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi):

a. Latar Belakang Program

Permasalahan kekurangan gizi merupakan permasalahan serius bagi Indonesia. Sekitar 30% penduduk dunia termasuk Indonesia, terutama anak-anak, beresiko menderita kekurangan asupan gizi berupa

kandungan mineral dari unsur Zn (seng). Lebih serius diperoleh data bahwa Proporsi Berat Badan Lahir Rendah (< 2.500 gram/BBLR) mengalami kenaikan dari 5,7% pada tahun 2013 menjadi sebesar 6,2% pada tahun 2018.

Selain berakibat menurunnya daya tahan tubuh, produktivitas, dan kualitas hidup manusia, kekurangan unsur Zn dalam tubuh juga menjadi salah satu faktor kekerdilan (*stunting*) yang prevalensinya cukup besar dan merata di Indonesia. Kadar mineral penting seperti Fe (besi) dan Zn (seng) dapat ditingkatkan melalui program Biofortifikasi, yang merupakan fortifikasi mineral penting melalui perakitan varietas.

b. Keuntungan Biofortifikasi, diantaranya adalah:

- 1) dapat dikembangkan pada bahan makanan pokok;
- 2) fortifikasi benih hanya perlu dilakukan sekali di awal penggunaan;
- 3) bermanfaat bagi masyarakat konsumen rawan gizi; serta
- 4) produktivitas tinggi dan ramah lingkungan.

Selain kaya nutrisi, varietas padi kaya gizi memiliki ketahanan terhadap wereng batang coklat (WBC), Blas, dan Tungro, disamping memiliki rasa nasi yang enak. Gaya hidup sehat yang terus berkembang mendorong semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan sehat. Selanjutnya, berkembangnya ilmu dan teknologi menyebabkan fungsi nasi pun menjadi bergeser, dari hanya sebagai sumber karbohidrat, menjadi sekaligus sebagai penambah nutrisi.

c. Komponen Bantuan Budi Daya

- 1) Benih Padi Inpari Nutri Zinc sebanyak 25 kg/hektar.
- 2) Pupuk NPK Non Subsidi sebanyak 100 kg/hektar.
- 3) Bio Pestisida sebanyak 100 Kg/Hektar.

d. Program Penanaman Padi Biofortifikasi di Jawa Tengah

Alokasi luas kegiatan tahun 2020 adalah sejumlah 2.378 hektar, yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Pemalang seluas 2.050 hektar dan Kabupaten Sukoharjo seluas 328 hektar.

e. Program Penanaman Padi Biofortifikasi di Kabupaten Pemalang

- 1) Kegiatan Bantuan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Tahun 2020 dilaksanakan di 10 kecamatan, 32 desa, dan dilaksanakan oleh 61 kelompok tani/gabungan kelompok tani.

- 2) Sampai dengan bulan Oktober 2020, telah ditanam Padi Kaya Gizi seluas 2.050 hektar, dengan realisasi pemanenan seluas 1.064 hektar dan jumlah produksi sebanyak 7.828 ton beras (produktivitas sebanyak 73,6 kuintal/hektar).



2. Aspirasi/Masukan:

a. Petani

- 1) Petani yang mengikuti program Pemerintah berupa penanaman padi gizi tinggi (Nutrizinc) telah memperoleh informasi bahwa kelebihan dari viretas padi ini adalah memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan waktu/umur tanam yang lebih singkat dari jenis padi yang selama ini ditanam, disamping adanya kekurangan berupa bulir padi yang kecil, mudah pecahnya bulir padi saat pengolahan pascapanen, serta kurang enak/pulennya rasa beras yang dihasilkan.
- 2) Petani merasa khawatir atas pemasaran hasil panen (beras maupun gabah), mengingat saat ini petani menjual hasil panennya melalui jasa tengkulak (tidak langsung kepada BULOG), dan diperoleh informasi bahwa mengingat kekurangan yang dimiliki, para tengkulak kurang berminat atas padi Nutrizinc yang saat ini sedang ditanam oleh petani, sehingga harga yang diberikan menjadi sangat rendah.

- 3) Dalam kesempatan diskusi, untuk meningkatkan semangat petani dalam menyukseskan program pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting dengan penanaman padi gizi tinggi (Nutrizinc), petani menyampaikan aspirasi/harapan sebagai berikut:
 - a) harga jual hasil panen (baik berupa beras maupun gabah) diharapkan tidak lebih rendah dari harga jenis beras/gabah yang sebelumnya telah ditanam oleh petani;
 - b) adanya kepastian pasar atas hasil panen padi Nutrizinc yang dihasilkan oleh petani;
 - c) diberikannya bantuan tambahan kepada para petani yang menanam padi Nutrizinc, berupa sarana dan prasarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian maupun pupuk bersubsidi.
- b. Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi
 - 1) Perlu adanya penyuluhan kepada petani agar mau menanam padi kaya gizi secara sukarela karena termasuk varietas baru yang belum pernah ditanam oleh para petani sebelumnya.
 - 2) Terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh para petani atas pemasaran hasil panen padi kaya gizi, mengingat biasanya sistem penjualan padi yang biasa berlaku adalah dengan cara ditebas oleh tengkulak, yang mengakibatkan kurangnya minat para tengkulak pagi.
 - 3) Perlu adanya sistem penjualan padi kaya gizi yang bekerja sama dengan pihak lain, seperti BULOG, sehingga padi (beras) kaya gizi dapat didistribusikan langsung kepada masyarakat yang memerlukan (masyarakat yang mengalami *stunting*).

3. Tanggapan:

a. Kementerian Pertanian

- 1) Segmentasi pasar padi Nutrizinc adalah ibu-ibu hamil, anak-anak kurang gizi, dan para manula. Untuk itu, akan diatur kebijakan penyerapan hasil panen padi Nutrizinc (dalam hal ini Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan BULOG, yang juga merupakan salah satu mitra Komisi IV) yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), diantaranya

Puskesmas, Klinik Pengobatan dan Rumah Sakit di seluruh daerah yang menjadi target program pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting*.

- 2) Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran dalam rangka memberikan kepastian harga hasil panen padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) baik dalam bentuk beras maupun gabah, dalam rangka melindungi para petani padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).
- 3) Kementerian Pertanian akan mengalokasikan anggaran tambahan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi serta fasilitas/bantuan lainnya.

b. Perum BULOG

- ✓ Dalam rangka menyukseskan program pemerintah untuk mengatasi masalah *stunting* nasional, Perum BULOG bersedia mengakomodir kebijakan pemerintah berupa penyerapan dan pendistribusian hasil produksi padi Nutrizinc, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).

c. PT Pertani

- ✓ Dalam rangka menyukseskan program Pemerintah untuk mengatasi masalah *stunting* nasional, PT Pertani bersedia mengakomodir kebijakan pemerintah berupa penyerapan produksi padi Nutrizinc untuk keperluan benih tanaman, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) untuk keperluan benih tanaman.

Rekomendasi:

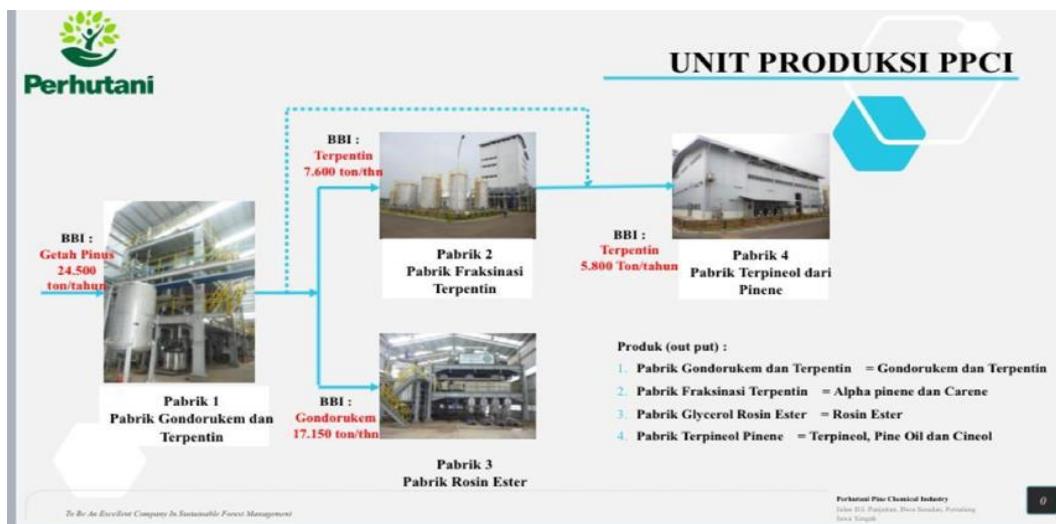
1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada para petani yang telah dengan sukarela menanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) untuk menyukseskan program pemerintah dalam mengatasi permasalahan *stunting* nasional.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam hal:
 - a. mengatur kebijakan penyerapan hasil panen padi Nutrizinc yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- (Fasyankes) di seluruh daerah yang menjadi target program Pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan stunting nasional.
- b. mengalokasikan anggaran dalam rangka memberikan kepastian harga hasil panen padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) baik dalam bentuk beras maupun gabah, dalam rangka melindungi para petani padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).
 - c. mengalokasikan anggaran tambahan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi serta fasilitas/bantuan lainnya.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Perum BULOG untuk mengakomodir kebijakan pemerintah berupa penyerapan dan pendistribusian hasil produksi padi Nutrizinc, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).
 4. PT Pertani serta Mitra BUMN sejenis untuk mengakomodir kebijakan pemerintah berupa penyerapan produksi padi Nutrizinc untuk keperluan benih tanaman, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) untuk keperluan benih tanaman.

E. KUNJUNGAN KE PABRIK PENGOLAHAN GETAH PINUS PERUM PERHUTANI (PERHUTANI PINE CHEMICAL INUDTRY) DI KABUPATEN PEMALANG

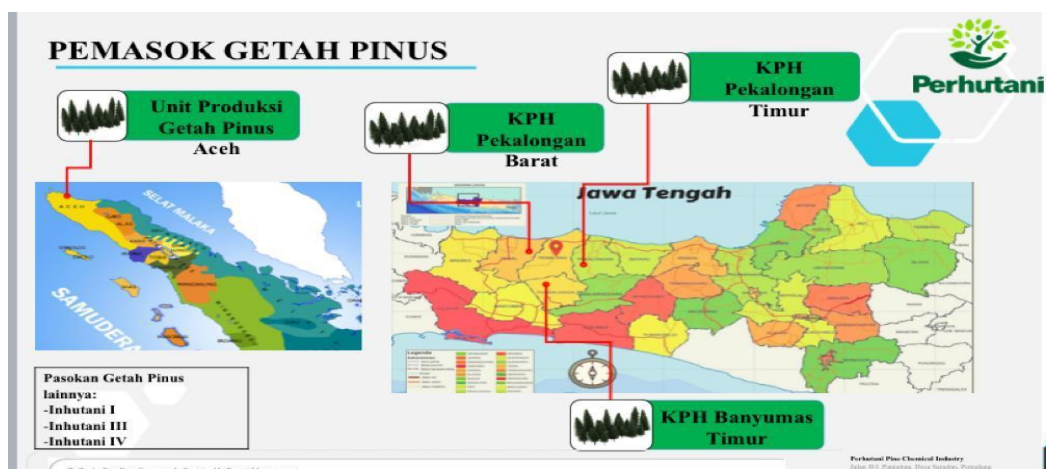
1. Perhutani *Pine Chemical Industry* (PPCI) merupakan Pabrik Derivat Gondorukem dan Terpentin milik Perum Perhutani yang didirikan di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Alasan pemilihan lokasi pabrik pengolahan getah pinus di tempat ini adalah karena kemudahan akses jalan kontainer, berdekatan dengan pelabuhan, kemudahan akses bahan baku dan penunjang, kepadatan penduduk yang rendah, dan ketersediaan utilitas.
2. Pabrik ini terdiri dari 4 plan/unit pengolahan yang mengolah bahan baku yang berbeda-beda dan nantinya akan menghasilkan produk yang berbeda pula, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pabrik Gondorukem dan Terpentin yang akan menghasilkan Gondorukem dan Terpentin;

- b. Pabrik Fraksinasi Terpentin yang akan menghasilkan Alpha pinene dan Carene;
- c. Pabrik Glycerol Rosin Ester yang akan menghasilkan Rosin Ester; dan
- d. Pabrik Terpeneol Pinene yang akan menghasilkan Terpeneol, Pine Oil, dan Cineol.

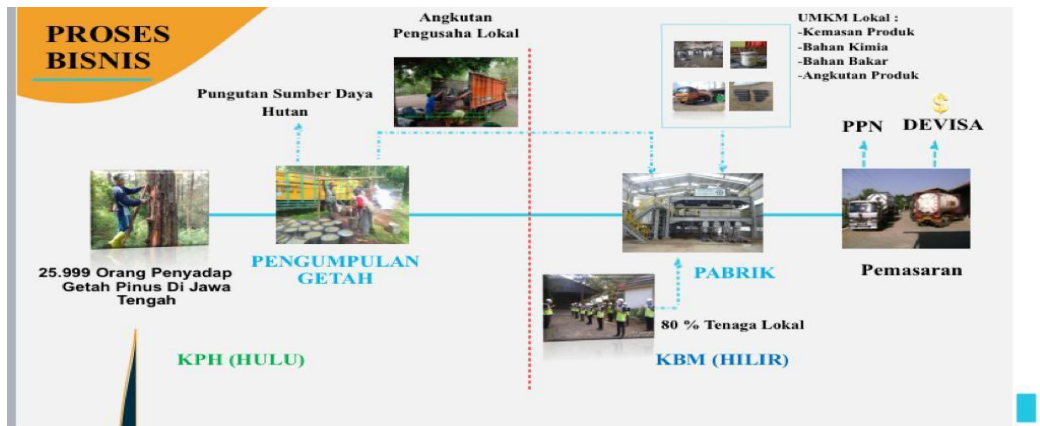


- 3. Permasalahan awal yang dihadapi oleh pabrik adalah mengenai pasokan bahan baku getah dengan target 24.500 ton/tahun namun baru dapat terpenuhi sekitar 5.000 ton/tahun. Untuk kapasitas produksi dari hasil pengolahan getah berupa gondorukem sejumlah 17.100 ton/ha dan terpentin sejumlah 3.400 ton/ha.

Sumber bahan baku PPCI adalah berasal dari:



4. Proses Bisnis



5. Aplikasi Gum, Rosin dan Derivatnya



6. Kontribusi Proses Bisnis Sadapan Getah Pinus dan Industri Derivat Gondorukem dan Terpentin Perum Perhutani

APLIKASI PRODUK TERPENTIN & DERIVATNYA

Produk Alpha Pinene

Kegunaan :

- Industri Parfum dan Wewangian
- Bahan Baku Terpeneol dan Cineol
- Industri Kosmetik

Produk Alpha Terpeneol

Kegunaan :

- Industri Wewangian
- Industri Sabun dan Kosmetik
- Industri Antiseptic
- Floating Agent Industri Tambang
- Industri Sabun & Deterjen

Produk Delta Carene

Kegunaan :

- Industri Parfum dan Wewangian
- Industri Menthol

Produk Cineol

Kegunaan :

- Industri Wewangian
- Industri Obat-obatan/Farmasi
- Industri Minyak Gosok
- Industri Pencuci Mulut
- Sebagai Insektisida (Pengusir Serangga)

7. Kontribusi Proses Bisnis Sadapan Getah Pinus dan Industri Derivat Gondorukem dan Terpentin Perum Perhutani



8. Dukungan yang Diperlukan

DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN

Pelarangan Ekspor Getah
Saat ini masih terdapat getah pinus yang diekspor padahal pabrik Indonesia masih kekurangan bahan baku

Pencabutan Moratorium Getah Pinus Keluar Propinsi
Ada wilayah tertentu yang melarang getah pinus diangkut keluar provinsi

Perhutani

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perhutani *Pine Chemical Industry* (PPCI) yang masih terus dapat bertahan dalam menjalankan bisnis industri pengolahan hasil hutan bukan kayu berupa pemanfaatan getah pinus dalam konsesi bisnis kehutanan yang saat ini kurang menguntungkan, dan bahkan telah menjadi salah satu perusahaan

- penyumbang devisa bagi negara, disamping membantu Pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan koordinasi atas kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka menjamin kesinambungan bahan baku getah pinus bagi industri dalam negeri di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung berkembangnya industri pengolahan getah pinus nasional agar dapat bersaing di pasar internasional.
 3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan koordinasi atas kebijakan Pemerintah Provinsi Menjamin dalam rangka memberikan peluang pasar bagi produsen getah pinus dengan membuka akses pemasaran ke luar provinsi.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti aspirasi nelayan dan stakeholder hasil kunjungan kerja reses ke Satwas PSDKP Kota Pekalongan, seperti:
 - a. Penguatan infrastruktur sarana dan prasarana pengawasan di satwas PSDKP Pekalongan, antara lain: 1) Armada speedboat pengawasan, 2) Dukungan lahan atau bangunan kantor dari Pemda, 3) Kendaraan operasional pengawas, serta 3) Tanggul dan akses jalan yang rusak.
 - b. Peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja agar segala permasalahan tentang nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar ikan segera terselesaikan melalui sistem satu pintu.
 - c. Perbanyakkan pelibatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang selama ini telah dilakukan melalui sistem kelembagaan yang sinergi dan handal untuk peningkatan kepatuhan kapal perikanan berukuran < 10 GT yang belum terdaftar.

- d. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai BBM, khususnya subsidi solar yang masih belum merata di nelayan.
 - e. Memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana kampung nelayan di Kota Pekalongan agar kesan kumuh, penduduknya miskin, pendidikan rendah dan rawan kriminalitas perlahan berkurang dan hilang jika ada APBN-P tahun 2020.
2. Komisi IV DPR RI meminta *Holding Pupuk Indonesia* berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, seperti:
- a. Penuntasan akses petani mendapatkan kartu tani di wilayah yang sudah ditetapkan mengingat implementasi masih banyak kendala.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana ke Dinas terkait melalui validitas dan updating data e-RDKK, dan dukungan Himbara dalam proses pencetakan dan pendistribusian Kartu Tani, pemasangan mesin EDC, dan kesiapan Dashboard Bank.
 - c. Selama periode musim tanam, petani mendapatkan jaminan pupuk bersubsidi khususnya sistem penyaluran pupuk dari lini I hingga lini IV yang melibatkan pihak dan aparat terkait.
3. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada petani khususnya kepada BUMDES agar persyaratan kualitas beras yang diinginkan dapat dipenuhi dengan kadar air yang rendah.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam hal:
- a. mengatur kebijakan penyerapan hasil panen padi Nutrizinc yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di seluruh daerah yang menjadi target program Pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan stunting nasional.
 - b. mengalokasikan anggaran dalam rangka memberikan kepastian harga hasil panen padi gizi tinggi (padi Nutrizinc), baik dalam bentuk beras maupun gabah, dalam rangka melindungi para petani padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).
 - c. mengalokasikan anggaran tambahan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi, serta fasilitas/bantuan lainnya.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Perum BULOG untuk mengakomodir kebijakan pemerintah berupa penyerapan dan pendistribusian hasil produksi padi Nutrizinc, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc).
6. PT Pertani serta Mitra BUMN sejenis untuk mengakomodir kebijakan Pemerintah berupa penyerapan produksi padi Nutrizinc untuk keperluan benih tanaman, termasuk di dalamnya program sosialisasi dan pembinaan kepada petani penanam padi gizi tinggi (padi Nutrizinc) untuk keperluan benih tanaman.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan koordinasi atas kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka menjamin kesinambungan bahan baku getah pinus bagi industri dalam negeri di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung berkembangnya industri pengolahan getah pinus nasional agar dapat bersaing di pasar internasional.
8. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan koordinasi atas kebijakan Pemerintah Provinsi menjamin dalam rangka memberikan peluang pasar bagi produsen getah pinus dengan membuka akses pemasaran ke luar provinsi.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 9 November 2020
Ketua Tim,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

A-151

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://headlineJawa Tengah.com/2020/07/21/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-perusahaan-ggf/>

<https://mediaJawa Tengah.co.id/pemprov-harapkan-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-untuk-pengembangan-potensi-kelautan-perikanan/>

<https://bbpbl.djpb.kkp.go.id/kepala-bbpbl-Jawa Tengah-mewakili-djpb-hadiri-kunker-komisi-iv-dprri-ke-prov-Jawa Tengah/>

https://www.youtube.com/watch?v=GFDcGg_WBHQ

<https://rakyatJawaTengah.id/komisi-iv-dpr-ri-optimis-program-csv-ggf-terus-berkembang/>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29502/t/Pembenihan+Tanaman+di+Persemaian+Permanen+Jawa Tengah+Selatan+sudah+Baik>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29500/t/Komisi+IV+Dukung+Kementan+Tingkatk an+Produksi+Pertanian+di+Jawa Tengah>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29513/t/BKIPM+Jawa Tengah+Diminta+Jaga+Mutu+Komoditas+Budidaya+Udang>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29523/t/Pajak+Ekspor+Hortikultura+Tinggi%2C+Komisi+IV+Akan+Bersurat+Kepada+Kemenkeu>

<https://www.Jawa Tengah77.com/reses-di-Jawa Tengah-komisi-iv-dpr-tinjau-penyemaian-bibit-hingga-panen-jagung/>

<https://www.gesuri.id/pemerintahan/reses-komisi-iv-dpr-kunjungi-Jawa Tengah-b1YPwZuFj>

<https://www.Jawa Tengahselatankab.go.id/web/2020/07/20/kunker-ketua-komisi-iv-dpr-ri-puji-keberhasilan-pembibitan-bpp-lamsel/>

<https://Jawa Tengahprov.go.id/detail-post/pemprov-Jawa Tengah-berharap-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-untuk-kembangkan-potensi-kelautan-dan-perikanan-Jawa Tengah>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/330016-komisi-iv-dpr-dukung-kementan-genjot-produksi-pertanianJawa Tengah>

<https://www.radarlamsel.com/kunker-komisi-iv-dpr-ri-dan-kementan-ri-dapat-keluhan-harga-jagung-anjlok/>

<https://www.redaksi24.com/komisi-iv-dpr-dan-kementan-panen-raya-jagung-di-Jawa Tengah/>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29500/t/Komisi+IV+Dukung+Kementan+Tingkat+an+Produksi+Pertanian+di+Jawa+Tengah>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30578/t/Pemerintah+Perlu+Sosialisasikan+Keunggulan+Padi+Inpari+Nutri+Zinc>

<https://pilarpertanian.com/kunjungi-pemalang-komisi-iv-dpr-apresiasi-program-kementan-atasi-stunting/>

<https://sumaterapost.co/kunker-anggota-dpr-ri-di-kabupaten-pemalang-program-ketahanan-pangan-di-jawa-tengah/>

<https://www.pemalangkab.go.id/2020/11/bupati-pemalang-terima-kunker-komisi-iv-dpr-ri/>

<https://www.telaah.id/2020/11/05/kunjungi-pemalang-dpr-apresiasi-program-stunting-kementan/>

<https://www.puskapik.com/14580/berita/dpr-ri-kunjungi-pabrik-gondorukem-pemalang-bupati-tingkatkan-kesejahteraan-karyawan/>

<https://perhutani.co.id/komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-pabrik-perhutani-pine-chemical-industry-ppci-di-pemalang/>

<https://www.facebook.com/DPRRI/posts/tim-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-yang-dipimpin-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-/3177529559014514/>